

Menjadi Gereja Indonesia yang Gembira dan Berbelaskasih

*dulu, kini, dan
esok*



Editor:
Raymundus Sudhiarsa, SVD
Paulinus Yan Olla, MSF

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana
ISSN 1411 - 9005

**MENJADI GEREJA INDONESIA
YANG GEMBIRA DAN
BERBELAS KASIH**
(Dulu, Kini dan Esok)

Editor:
Raymundus Sudhiarsa SVD
Paulinus Yan Olla MSF

STFT Widya Sasana
Malang 2015

MENJADI GEREJA INDONESIA YANG GEMBIRA DAN BERBELAS KASIH

(Dulu, Kini dan Esok)

STFT Widya Sasana
Jl. Terusan Rajabasa 2
Malang 65146
Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676
www.stftws.org; stftws@gmail.com

Cetakan ke-1: Oktober 2015

Gambar sampul:

www.chatolicherald.co.uk/news/2015/08/03/key-dates-for-the-year-of-mercy-unveiled/.

ISSN: 1411-905

DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA
VOL. 25, NO. SERI NO. 24, TAHUN 2015

Pengantar	
<i>Editor</i>	i
Daftar Isi	iv

TINJAUAN HISTORIS

Kristiani Purba Indonesia (Pancur – Barus)	
<i>Edison R.L. Tinambunan O.Carm.</i>	3
Panorama Gereja Katolik Indonesia [1]: Menyimak Kontribusi Muskens dan Steenbrink	
<i>Armada Riyanto CM</i>	26
Panorama Gereja Katolik Indonesia [2]: Pendudukan Jepang dan Pemulihannya (Konteks Misi Surabaya)	
<i>Armada Riyanto CM</i>	43
St. Maria Ratu Rosario Sebagai Bintang Misi-Evangelisasi di Nusa Tenggara	
<i>Kristoforus Bala SVD</i>	98

TINJAUAN BIBLIS TEOLOGIS

Umat Terpilih Hidup dari Belaskasih dan Kegembiraan	
<i>Supriyono Venantius SVD</i>	151

Mewartakan Injil dengan Gembira dan Berbelas Kasih. Belajar dari Gereja Para Rasul <i>F.X. Didik Bagiyowinadi Pr</i>	169
Israel Bercerita Tentang Masa Lampaunya <i>Berthold Anton Pareira O.Carm.</i>	190
Berdoa Bagi Gereja <i>Berthold Anton Pareira O.Carm.</i>	199

TINJAUAN FILOSOFIS DAN SOSIO-KULTURAL

Gereja Dalam Pusaran Ideologi Global: Sebuah Diagnosis dan Prognosis Seturut <i>Evangelii Gaudium</i> <i>Valentinus Saeng CP</i>	215
Menghadirkan Wajah Gereja Berparas Kemanusiaan: Potret Gereja Menjadi <i>Pius Pandor CP</i>	233
Memahami Medan Pelayanan Gereja Indonesia Dewasa Ini (Tantangan menghadirkan Gereja gembira dan berbelaskasih) <i>Robertus Wijanarko CM</i>	273
Konsili Vatikan II: Sebuah Revolusi Sunyi dan Pengaruhnya Bagi Gereja Katolik Indonesia <i>Valentinus Saeng CP</i>	289
Membaca Wajah Gereja Katolik Yang Bersukacita dan Berbelas Kasih di Indonesia Dewasa Ini Dalam Terang Filsafat Sosial <i>Donatus Sermada Kelen SVD</i>	313
Wajah Islam Nusantara Bagi Gereja <i>Peter B. Sarbini SVD</i>	343

TINJAUAN PASTORAL TEOLOGIS

Pengadilan Gerejawi Yang Berbelas Kasih Sesudah M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus: Cita-Cita dan Tantangan <i>A. Tjatur Raharso Pr</i>	355
Warta Sukacita dan Belas Kasih Bagi Kaum Miskin. (Landasan-Landasan Spiritual Keberpihakan Gereja Pada Kaum Miskin dalam EG dan MV) <i>Paulinus Yan Olla MSF</i>	380
Homili dan Pembangunan Gereja Masa Depan (<i>Evangelii Gaudium</i> , art.135-159) <i>Berthold Anton Pareira O.Carm.</i>	393
Membangun Gereja Yang Berbelaskasih. Belajar dari Santo Vinsensius de Paul <i>Antonius Sad Budianto CM</i>	404
“Murid-Murid Yang Diutus”, Sukacita Gereja Indonesia <i>Raymundus Sudhiarsa SVD</i>	417

EPILOG

Mengenal Anjuran Apostolik “ <i>Evangelii Gaudium</i> ” dan Bula “ <i>Misericordiae Vultus</i> ” <i>Merry Teresa Sri Rejeki H.Carm</i>	435
Mengapa Bergembira dan Berbelaskasih? <i>Piet Go O.Carm.</i>	447
Sukacitaku. Puisi St.Teresia dari Kanak-kanak Yesus <i>Berthold Anton Pareira O.Carm.</i>	454
Kontributor	459

MEMBACA WAJAH GEREJA KATOLIK YANG BERSUKACITA DAN BERBELAS KASIH DI INDONESIA DEWASA INI DALAM TERANG FILSAFAT SOSIAL

Donatus Sermada Kelen SVD

Pendahuluan

Tema hari studi STFT tahun 2015 diangkat dari dua dokumen gereja yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Kedua dokumen itu adalah seruan apostolis “*Evangelii Gaudium*” dan bula “*Misericordiae Vultus*”. Meskipun kedua dokumen ini bukanlah traktat filsafat-teologi, tetapi butir-butir yang termuat di dalam kedua dokumen tersebut bisa diteropong oleh disiplin filsafat-teologi. Penulis meneropong kedua dokumen itu dalam kaca mata filsafat sosial yang membaca dan memahami butir-butir pemikirannya sebagai seruan-seruan etis yang dilandasi oleh nilai-nilai religius kristiani, dalam hal ini nilai-nilai injili. Seruan-seruan etis ini sudah direfleksikan juga oleh pemikir-pemikir besar katolik seperti Agustinus, Thomas Aquinas, para penganut Neo-Thomisme yang ide-ide mereka sejalan dengan filsafat Pancasila, ketika para pemikir itu berbicara tentang realitas sosial-historis masyarakat. Wajah Gereja Katolik Indonesia dewasa ini diteropong dengan pendekatan tersebut.

1. Tugas Filsafat Sosial

Filsafat sosial adalah salah satu disiplin filsafat sistematis yang merefleksikan dan mengartikulasikan realitas sosial. Sering disebut juga filsafat tentang masyarakat. Sebagai satu disiplin filsafat, filsafat sosial dikenal beriringan dengan munculnya disiplin sosiologi pada akhir abad 18. Dalam arti yang luas, filsafat sosial mencakup filsafat ilmu pengetahuan sosial seperti ekonomi dan sejarah, filsafat politik, filsafat hukum dan etika. Dalam arti

sempit, filsafat sosial adalah teori konseptual tentang masyarakat dan bagian dari filsafat moral yang mempelajari norma tindakan sosial dan keterlibatan individual dalam membangun satu masyarakat.¹

Tugas filsafat sosial adalah untuk merefleksikan apa yang menjadi unsur hakiki satu masyarakat sebagai satu realitas sosial. Dalam kegiatan refleksif, filsafat sosial berkepentingan untuk menguji dan mempersoalkan kembali konsep-konsep tentang masyarakat apakah konsep-konsep atau teori-teori itu mengungkapkan unsur-unsur hakiki realitas sosial secara tepat dan benar. Kontroversi filosofis yang masih berjalan hingga kini terfokus pada persoalan tentang hakekat masyarakat dalam terang individualisme atau dalam terang kolektivisme.² Dalam terang individualisme, realitas sosial itu adalah “kumpulan individu”. Masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa individu. Dalam terang kolektivisme, realitas sosial itu adalah satu kesatuan organik (satu kesatuan yang hidup-hidup) seperti tubuh manusia yang terdiri dari anggota-anggotanya. Individu tidak mungkin tercipta tanpa masyarakat. Seorang manusia individual tidak mungkin lahir dari seorang manusia individual saja, tapi dari satu kesatuan laki-laki dan perempuan. Kontroversi semacam itu muncul pada zaman modern, ketika penelitian terhadap masyarakat melalui disiplin ilmu-ilmu empiris-positif membuahkan konsep-konsep tentang masyarakat secara historis-materialistis melalui (Karl Marx). Realitas sosial dalam terang ilmu-ilmu itu adalah masyarakat yang ada di sini dan sekarang ini, satu realitas sosial yang bersifat duniawi melalui. Konsep tentang adanya masyarakat surgawi yang menyerap dan meresap ke dalam masyarakat duniawi dalam satu kesatuan yang dinamis tidak masuk dalam refleksi filosofis zaman modern. Meskipun demikian, tugas filsafat sosial tidak terbatas pada refleksi filosofis yang menyentuh kontroversi itu saja, tetapi meluas ke usaha reflektif untuk melibatkan prinsip-prinsip metafisis yang mendasari adanya realitas sosial yang bersifat duniawi. Konsep Agustinus dalam karyanya “*De Civitate Dei*”, konsep tentang masyarakat

-
- 1 Robert Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. New York: Cambridge University Press, 1995, hlm. 747.
 - 2 Gerd Haefner, *Philosophische Anthropologie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1989, hlm. 61-68.

yang diilhami oleh filsafat Pancasila dan gagasan Neo-Thomisme yang mengeritik posisi filsafat modern dengan titik tolak filsafat Thomas Aquinas tentang masyarakat, sungguh masuk dalam kajian filsafat sosial.

Dalam terang filsafat sosial, gereja katolik dilihat sebagai salah satu realitas sosial dari banyak realitas sosial yang lain, tapi tidak bolehlah disimpulkan secara serta merta bahwa gereja katolik identik dengan realitas sosial. Ada dimensi lain yang secara hakiki menunjukkan identitas atau jati diri gereja katolik, seperti dimensi religius-spiritual, dimensi teologis-kristologis, dimensi eklesiologis, dimensi politis-hirarkis dan lain-lain. Pemahaman umum yang melibatkan semua dimensi itu dalam tradisi iman katolik adalah bahwa gereja katolik sebagai salah satu realitas sosial diartikulasikan sebagai persekutuan atau kesatuan umat beriman yang mengikuti dan percaya kepada Yesus Kristus dalam satu kesatuan tubuh mistik Kristus yang terdiri dari gereja yang sudah berbahagia (para orang kudus), gereja yang sedang mengalami pemurnian (para pengikut Kristus yang sedang berada di tempat penyucian) dan gereja yang sedang berziarah di dunia (para pengikut Kristus di dunia). Gereja dalam klasifikasi seperti itu berada di bawah kepemimpinan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang tak kelihatan, sementara kepala gereja yang kelihatan menyata dalam diri Paus dengan garis hirarkis yang jelas seperti yang ditemukan sekarang. Filsafat sosial mempunyai kepentingan yang sangat luas untuk merefleksikan dan mengartikulasikan relasi timbal balik ketiga jenis persekutuan itu, tetapi karena keberadaan dan tugas filsafat sosial di zaman modern ini dibataskan secara ketat pada refleksi historis-materialistis, dalam arti bahwa refleksi tentang realitas sosial didasarkan pada fakta-fakta empiris-konkrit yang dialami manusia, maka pemahaman tentang realitas sosial di zaman modern dipersempit pada pokok persoalan, apakah realitas sosial itu tercipta di atas prinsip-prinsip metafisis seperti yang dianuti oleh umat beriman atau di atas prinsip historis-materialistis seperti yang dianuti oleh kaum sekular-atheistis.

Ketika berbicara tentang Anjuran Apostolik “*Evangelii Gaudium*” (Sukacita Injil) yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada 24 Nopember 2013 dan bula Paus Fransiskus “*Misericordiae Vultus*” (Wajah Kerahiman) yang diumumkan pada tanggal 11 April 2015, filsafat sosial bertugas untuk mencermati dan merefleksikan isi dokumen itu dalam peneropongan “etika

sosial”. Mengapa? Etika sosial berurusan dengan masyarakat dan soal-soal masyarakat, dan dalam hal ini tindakan dan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Walter Kerber dalam karyanya *“Sozialethik”* menulis tentang tugas etika sosial sebagai....*pada tempat pertama menyibukkan diri dengan apa yang benar secara moral, dan tidak banyak berurusan dengan pendirian moral manusia, pendirian tentang wujud kebaikan moral.*³ Etika sosial menjadi bagian dari filsafat sosial yang dalam situasi modern dewasa ini bertugas untuk menemukan bentuk-bentuk baru atau tata tertib baru masyarakat dalam usaha untuk menciptakan satu masyarakat baru yang lebih manusiawi. Hal ini menuntut keberanian dan inisiatif manusia modern untuk berperan dalam pembentukan masyarakat yang lebih manusiawi dengan digerakkan bukan oleh bangunan moral pribadi tetapi oleh kesadaran dan tanggung jawab moral *“bersama”* yang sedang menyaksikan ketidakadilan dan ketidakbenaran tatanan sosial yang sedang berlaku dewasa ini.

Isi dari kedua dokumen gereja itu dalam terang etika sosial adalah satu seruan etis yang ditujukan kepada umat beriman katolik dalam kebersamaannya (gereja sebagai salah satu realitas sosial) untukewartakan dan menghayati nilai-nilai injil dengan pola tingkah laku hidupnya yang berkarakter *“sukacita”* dan *“belaskasih”* di tengah-tengah dunia modern yang sedang mengidap penyakit-penyakit sosial. Seruan etis ini tentu tidak diilhami oleh ideologi sekular-atheistis, tetapi berakar dalam etika religius, dan dalam hal ini nilai-nilai spiritual kristiani seperti nilai-nilai injili dan nilai-nilai ajaran iman (nilai teologis). Ensiklik *“Sukacita Injil”* dalam bab IV menampilkan dimensi sosial evangelisasi, dan isi dari bab ini tentu menjadi bahan kajian yang menarik dari etika sosial untuk dikonfrontasikan dengan masyarakat Indonesia dewasa ini. Begitu juga, bula *“Misericordiae Vultus”*

3 *“Die Sozialethik beschaeftigt sich also in erster Linie mit der Bestimmung des sittlich Richtigen, weniger mit der sittlichen Gesinnung der Menschen, der sittlichen Guttheit.”* Walter Kerber, *Sozialethik. Grundkurs Philosophie 13*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1998, hlm.12, bdk. Donatus Sermada, *Etika Sosial Nilai dan Institusi Dalam Peneropongan Psikoanalisa*, dalam: *Moralitas Lentera Peradaban Dunia*. Andre Ata Ujan dkk (eds.). Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011, hlm. 97-101.

memuat dimensi sosial dalam nomor 15 hingga nomor 20.⁴ Isi dari bagian-bagian kedua dokumen tersebut akan ditunjuk dalam kaitannya dengan pembicaraan tentang gereja katolik Indonesia.

2. De Civitate Dei: Filsafat Sosial Agustinus

Kata bahasa Latin “*De Civitate Dei*” diterjemahkan secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia dengan ungkapan “*Tentang Kota Allah*”. Dalam pemahaman modern, kata “kota” berarti masyarakat dan dalam arti sosiologis, berarti realitas sosial atau realitas masyarakat. “*De Civitate Dei*” adalah karya Agustinus (354-430) yang ditulisnya antara tahun 413 dan 426, dan karya asli ini diperbaikinya lagi dalam bukunya “*Revisi-Revisi*” yang memuat revisi semua tulisannya termasuk tulisan “*De Civitate Dei*”. Buku “*Revisi-Revisi*” ini ditulisnya pada tahun 426 sampai tahun 427.⁵ Agustinus menulis buku tersebut, ketika dia sedang menjabat sebagai uskup Hippo di tanah kelahirannya di Afrika Utara.

Realitas sosial di tanah kelahirannya di Afrika Utara, ketika dia menjabat sebagai uskup dalam kesatuan dengan gereja katolik yang dipimpin oleh Paus di Roma, berada dalam situasi dan kondisi yang terpecah belah di dalam tubuh kekristenan sendiri. Kekristenan sendiri sudah diterima sebagai agama mayoritas penduduk di wilayah Afrika Utara, tetapi kekristenan ini terpecah ke dalam banyak kubu sejalan dengan ideologi religius dan filsafat yang mempengaruhinya, dan salah satu kubu sosial yang sangat berpengaruh

4 Dokumen “*Evangelii Gaudium*” (Sukacita Injil) yang dipakai sebagai sumber dalam artikel ini diambil dari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Seri Dokumen Gerejani No. 94 dengan judul “*Evangelii Gaudium Sukacita Injil*”. *Seruan Apostolik Paus Fransiskus 24 November 2013*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, Juli 2014. Dokumen “*Misericordiae Vultus*” yang dipakai sebagai sumber artikel ini diambil dari teks bahasa Jerman dengan judul “*Misericordiae Vultus Verkuendigungsbulle von Papst Franziskus zum Ausserordentlichen Jubilaum der Barmherzigkeit*”. *Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 200*. Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2015.

5 Van Diepen P., Mgr., OSA, *Agustinus Tahanan Tuhan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000, hlm. 147.

adalah kubu para penganut aliran Donatisme.⁶ Para penganut aliran ini kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat biasa yang tidak tahu banyak tentang perbedaan antara gereja Kristus yang benar dan gereja Kristus yang palsu, tetapi merasa tertarik dengan aliran Donatisme yang dipeluk oleh suku asli Berber Kristen di Afrika Utara yang secara politis sama sekali tidak setuju dengan imperialisme kekuasaan kekaisaran Romawi di Afrika Utara. Dengan adanya kesatuan yang tak terpisahkan antara gereja dan Negara yang berpusat di kota Roma, masyarakat Kristen di Afrika utara menilai kekristenan yang masih bersatu dengan kekuasaan gereja di Roma melalui uskup, imam dan umat katolik yang setia kepada Paus sebagai perpanjangan tangan kekuasaan imperialis kekaisaran Romawi. Salah satu kelompok garis keras yang menggabungkan diri dengan penganut Donatisme adalah kelompok Kaum Pengembara (sama seperti kaum Zelot Yahudi) yang menggunakan kekerasan, membakar rumah para petani katolik di desa dan membunuh uskup yang bersatu dengan Paus di Roma.⁷ Masa lalu Agustinus sebagai penganut aliran Manicheisme diungkit penganut Donatisme untuk menuding Agustinus, bahwa Agustinus sebagai uskup bukan pemimpin gereja Kristus yang benar.

Agustinus pernah menulis dua surat yang isinya melawan ajaran Donatisme, ketika dia bertugas sebagai imam di Kartago. Salah satu suratnya yang ditulis pada tahun 393 berjudul "*Psalmus contra Patrem Donati*", dan surat yang lain tidak ditemukan. Ternyata Agustinus tidak berhasil, karena aliran ini makin lama makin bertumbuh subur dengan bergabungnya para penganut gerakan radikal (Kaum Pengembara) di dalam kubu Donatisme, tetapi selama Agustinus menjabat sebagai uskup, Agustinus mengubah strategi pendekatannya terhadap Donatisme. Bukan lagi digunakan cara

6 Aliran Donatisme adalah satu gerakan skismatik di Afrika Utara pada abad 4 dan 5 dan didirikan oleh uskup Donatus yang memisahkan diri dari paus di Roma pada abad ke 4 di Kartago. Salah satu ajarannya ialah bahwa pelayanan sakramen yang dilakukan oleh seorang imam tertahbis yang berdosa tidak sah. Orang kristen yang sudah keluar dari gereja harus dipermadikan ulang. *New Catholic Encyclopedia. Second Edition*. Washington: The Catholic University of America, 2003, hlm. 861-864.

7 Van Diepen P., Mgr., OSA, *Augustinus...*Op.cit., hlm. 128-130.

pendekatan melalui konsep, kotbah dan tulisan-tulisan, tetapi melalui pertemuan langsung dengan para uskup penganut Donatisme untuk berdialog dan bertukar pikiran secara damai. Dalam pertemuan langsung ini, Agustinus meyakinkan para uskup penganut Donatisme akan wajah gereja Kristus yang lembut hati, sabar dan suka mengampuni dengan dasar nilai-nilai injil yang menyelamatkan. Orang Kristen yang sudah murtat tidak perlu dipermandikan ulang, tetapi diterima kembali dalam gereja; gereja Kristus tidak eksklusif untuk orang saleh dan benar, tetapi merangkul juga orang berdosa, sementara Allah sendiri menurunkan hujan untuk orang baik dan orang jahat dan membiarkan rumput ilalang bertumbuh bersama gandum. Universalitas gereja ditonjolkan Agustinus melalui pemeliharaan ikatan kesatuan dengan gereja yang dipimpin paus di Roma.

Meskipun realitas sosial-historis tersebut bukanlah faktor utama untuk menuliskan gagasan Agustinus tentang masyarakat, tetapi kenyataan sosial kekristenan yang dialaminya di Afrika Utara itu menumbuhkan ketajaman hati dan budi Agustinus untuk membaca pengalaman kebingungan masyarakat Kristen terhadap jati diri gereja Kristus yang benar. Perumusan pemikirannya tentang masyarakat dalam karya *“De Civitate Dei”* mendapatkan momen yang tepat dan tanpan tiga tahun sesudah kehancuran kota Roma dan kejatuhan kekaisaran Romawi ke dalam tangan bangsa barbarik yang datang dari utara Italia. Dalam Sejarah Dunia, akhir abad ke 4 dan awal abad ke 5 ditandai dengan perpindahan bangsa-bangsa di Eropa dengan jalan pedang dan perampasan, atau politik “bumi-hangus”. Kota Roma yang dipandang sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Yunani-Romawi dan juga pusat kekaisaran menjadi incaran bangsa-bangsa dari utara Italia seperti bangsa Goth, Alan, Vandal, Sueba. Peristiwa yang sangat memilukan hati Agustinus adalah jatuhnya kota Roma ke tangan bangsa Goth pada tanggal 24 Agustus tahun 410 di bawah panglima Alarik, seorang “Kristen”, meskipun kaum tentara Alarik yang melakukan porak-poranda bukanlah semuanya kristen. Para pengungsi yang sempat melarikan diri ke Afrika Utara melukiskan tragedi mengerikan dari kejatuhan kota Roma: perampokan, pembakaran kota selama tiga hari, pemerkosaan perempuan, pembunuhan dan pembantaian penduduk, penganiayaan. Hanya gedung gereja dan tempat suci seperti pemakaman dilarang Alarik untuk dijarah. Betapa kata-kata

para pengungsi itu sangat menyayat hati Agustinus hingga tak tertahanlah air mata Agustinus, ketika meresapi pengalaman pahit penduduk kota Roma dan penguasa kekaisaran.

Opini yang berkembang di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Romawi yang bukan Kristen (diistilahkan oleh gereja “bangsa kafir”), adalah bahwa orang kristenlah biang keladi kejatuhan kota Roma.⁸ Agustinus mengenal argumentasi mereka ketika mereka menuding orang kristen sebagai penyebab utama bencana yang menimpa Roma. Masyarakat Romawi yang bukan kristen itu berargumentasi melalui para tokohnya, bahwa kehancuran kota Roma merupakan satu siksaan para dewa terhadap penduduknya, karena penduduknya tidak lagi memuja dan menyembah para dewa-dewi dan telah menggantikan pemujaan dan penyembahan terhadap para dewa-dewi dengan penyembahan dan pemujaan terhadap Allah orang Kristen. Ketika penduduknya menyembah para dewa-dewi dan menghayati tradisi leluhur bangsa Romawi-Yunani yang bukan kristen, keagungan dan keemasan peradaban kebudayaan Romawi-Yunani menjulang tinggi, tetapi dengan kehancuran kota Roma, realitas sosial-historis masyarakat Roma yang menjelma dalam kesatuan gereja kristen dan Negara menjadi indikasi kuat, bahwa penghormatan dan pemujaan terhadap para dewa-dewi dalam tradisi kepercayaan lama tergusur dan terabaikan. Kepercayaan terhadap Allah orang Kristen menurut mereka berakibatkan pada penggusuran yang menghancurkan itu.

Agustinus tahu bahwa tudingan yang ditimpakan kepada orang Kristen tidak beralasan, karena kejatuhan kota Roma disebabkan oleh banyak faktor yang sangat kompleks dan bukannya oleh masyarakat Kristen yang sudah berkembang pesat. Tetapi Agustinus tidak bisa menghindari menyebarnya opini masyarakat yang dirasuki oleh argumentasi tudingan tersebut. Mengapa? Masyarakat luas yang sudah termakan opini tersebut, bersikap ragu-ragu terhadap Kekristenan, sementara orang kristen sendiri menjadi bingung terhadap jati dirinya sebagai orang Kristen. Dengan latar belakang

8 Richard Heinzmann, *Philosophie des Mittelalters. Grundkurs Philosophie, Band 7*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1992, hlm. 91-93.

masalah tersebut, Agustinus merasa perlu untuk melawan tudingan dan tuduhan itu dan merasa perlu untuk mencetuskan konsep teoretisnya tentang masyarakat sejati dalam rangka pemurnian iman kristiani terhadap jati dirinya sebagai orang Kristen. Niat untuk melawan tudingan dan tuduhan itu serta niat untuk mengusahakan pemurnian iman itulah yang mendesak hati nurani Agustinus untuk mengangkat pena dan menulis gagasannya tentang masyarakat dalam “De Civitate Dei”.

Karya “De Civitate Dei” yang terdiri dari 22 jilid memuat dua tema besar yang berhubungan satu sama lain. Sepuluh jilid pertama berisikan sangkalan Agustinus terhadap tuduhan tersebut dengan rincian: lima jilid pertama memuat bantahan Agustinus terhadap pendirian orang-orang bukan Kristen yang meyakini bahwa pemujaan dan penghormatan para dewa sangat diperlukan untuk kemakmuran manusia, sementara lima jilid yang berikutnya berisikan bantahan Agustinus terhadap argumentasi orang-orang bukan-Kristen yang berpendapat bahwa kebaktian terhadap para dewa sangat berguna untuk kehidupan di akhirat nanti. Dua belas jilid yang sisa memuat pendirian Agustinus yang mendasari iman kristiani dewasa ini tentang masyarakat sejati, dan gagasan pokok ini dirincikan: empat jilid pertama tentang dua jenis masyarakat yang disebut “kerajaan” dalam bahasa Kitab Suci; empat jilid kedua tentang keberlangsungan hidup kedua jenis kerajaan itu, dan empat jilid terakhir tentang nasib kedua kerajaan itu di kemudian hari.

Meskipun Filsafat Sosial sebagai satu filsafat sistematis muncul di abad modern, tetapi Agustinus sudah membuat satu refleksi sistematis-filosofis tentang masyarakat dalam karya besarnya itu. Konsepnya tentang masyarakat dibangun di atas dasar keyakinan religiusnya dengan mengacu pada realitas sosial-historis konkrit masyarakat kekaisaran Romawi. Kehancuran kota Roma adalah satu fakta historis yang tak terelakkan sebagai akibat dari tingkah laku sosial yang buruk penduduknya, terutama para penguasanya sepanjang sejarah kekaisaran. Para dewa dalam tradisi lama tidak berhasil menjauhkan para penganutnya dari tingkah laku yang buruk. Agustinus menulis:

“Pengikut-pengikut berhala tidak mempersalahkan dewa-dewi itu bahwa negeri sebelum kedatangan Kristus sudah merosot dan membusuk

*susilanya karena kemewahan, kelobaan dan kelakuan yang memalukan; tapi di pihak lain segala bencana yang sekarang diderita Negara akibat keangkuhan dan segala kenikmatannya yang risau, mereka dengan suara lantang menuduh iman kristiani”.*⁹

Agustinus tidak mengingkari nilai positif yang dialami bangsa Romawi sehubungan dengan tingginya peradaban dan kebudayaan Romawi-Yunani dalam sejarah kekaisaran, tetapi nilai-nilai positif itu sedang diredupkan oleh nilai-nilai negatif yang sedang meraja di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para penguasa dan kelompok elite, yaitu kemewahan, kelobaan, dekadensi moral, keangkuhan, kenikmatan (hedonis), kekerasan, dan berbagai macam bentuk kejahatan. Ada orang-orang kristen yang juga terperosok ke dalam cengkeraman gaya hidup dengan nilai-nilai negatif itu. Ketika gaya hidup yang dicengkeram oleh nilai-nilai negatif begitu meraja lela di seluruh kehidupan masyarakat, maka masyarakat baik masyarakat kristen maupun masyarakat bukan kristen tidak mampu lagi membedakan mana masyarakat yang sejati dan mana masyarakat yang jahat dan palsu. Di dalam situasi ketidakjelasan ini, masyarakat kristen yang menyebut dirinya “gereja” mempertaruhkan kehadirannya yang konkrit di dalam realitas sosial-historis yang ada apakah masyarakat kristen (gereja) identik dengan masyarakat yang lain.

Agustinus begitu jeli melihat dan merasakan kebingungan yang dialami oleh masyarakat pada saat itu, dan peristiwa kehancuran kota Roma sebagai kehancuran masyarakat kekaisaran yang meliputi hidup orang-orang kristen dan hidup orang-orang bukan-kristen direfleksikan Agustinus dalam terang sejarah keselamatan yang dituntun oleh kebaikan dan penyelenggaraan Allah sendiri. Agustinus dengan tajam membuat pembedaan antara masyarakat duniawi (istilah aslinya “Civitas terrena atau Civitas Diaboli”) dan masyarakat ilahi (istilah aslinya “Civitas Dei”). Bahasa Kitab Suci menyebut jenis masyarakat yang demikian sebagai “Kerajaan Allah” dan “Kerajaan dunia atau Kerajaan Setan”, sementara istilah Agustinus dalam terjemahan bahasa Indonesia “Kota Allah dan kota dunia”. Kedua jenis masyarakat ini

9 Van Diepen P., Mgr., OSA, *Agustinus...Op.cit.*, hlm.148.

memperlihatkan dinamika sejarah dalam perkembangannya menuju zaman eskatologi, dan awal mula terbentuknya kedua jenis masyarakat ini mengacu pada dikotomi dan pertentangan antara malekat yang baik dan malekat yang jahat (setan) pada zaman behula, dan dua kekuatan ini, kejahatan dan kebaikan, tertimpa pada garis keturunan Kain (kejahatan) dan garis keturunan Abel (kebaikan).

Masyarakat duniawi adalah masyarakat yang sedang berada dalam cengkeraman kekuatan jahat. Ia mengambil bentuk-bentuk konkrit seperti Negara, kota, organisasi, persekutuan, komunitas, korporasi, regu, tim dan sebagainya, baik masyarakat sekular-atheistis dalam pemahaman modern maupun masyarakat tidak-sekular yang dibangun di atas nilai-nilai religius. Di dalam masyarakat yang demikian, nilai-nilai negatif seperti kecongkakan, kelobaan, kemewahan, perbuatan jahat, dekadensi moral dan berbagai macam kejahatan telah menyerap dan menyatu di dalam diri para warganya yang disebut orang-orang jahat (orang berdosa dalam terang iman kristiani). Karakter khas yang melekat pada masyarakat jenis ini, ketika berada dalam cengkeraman kekuatan jahat, adalah cinta diri (*amor sui*), yang mencakup cinta akan kelompok sosialnya, cinta akan golongan dan sukunya, cinta akan partai politis dan cinta akan organisasi sosialnya dan sebagainya. Bahasa modern menyebut dampak negatifnya dalam pembentukan satu masyarakat yang mengidap penyakit “kolusi, korupsi dan nepotisme”. Karakter yang demikian bisa mengarah kepada penghinaan akan Allah, bahkan penolakan dan penyangkalan akan Allah. Ketika cinta diri menguasai tingkah laku sosial masyarakat, maka tujuan hidup yang dikejar pertama-tama adalah kepentingan hidup kelompok sosialnya dan bukan kesejahteraan umum. Para penguasa kekaisaran Romawi telah tersandung dan tertelan dalam watak cinta diri ini.

Masyarakat ilahi atau kota Allah adalah masyarakat yang dibentuk di atas dasar cinta Allah (*Amor Dei*) terhadap dunia dan manusia, cinta Allah yang melampaui ruang dan waktu, tetapi cinta Allah yang menampak dalam ruang dan waktu. Cinta Allah ini begitu meresap dan menyatu dalam diri warganya tanpa pandang bulu, sehingga para warganya hidup dalam pengabdian terhadap Allah dan sekaligus terhadap sesama. Pengabdian terhadap Allah dan terhadap sesama hingga kerelaan untuk berkorban demi

Allah dan sesama itulah bentuk pengungkapan cinta warganya akan Allah. Dalam masyarakat ilahi atau dalam kota Allah, cinta Allah meraja dan merangkul semua manusia dari segala bangsa, suku, ras dan kepercayaan. Karena itu, Allah adalah sang raja yang meraja dengan cinta, kebaikan dan penyelenggaraanNya yang nyata dalam sejarah umat manusia menuju masa depan yang eskatologis. Gereja Kristus yang sejati adalah masyarakat ilahi dan sedang ada dalam dunia, tetapi ia tidak sama dengan gereja yang kelihatan.

Dari pemahaman dan pembedaan Agustinus terhadap dua jenis masyarakat itu, Agustinus menunjukkan jati diri gereja Kristus yang sejati dalam rangka usahanya untuk menetapkan hubungan antara gereja dan Negara. Gereja Kristus yang sedang berziarah di dalam dunia ini (gereja Kristus yang kelihatan) dan Negara menampung warga dari kedua jenis masyarakat itu. Warga dari kedua jenis masyarakat itu hidup membaur dan bercampur sama seperti rumput ilalang (warga kerajaan dunia/setan) tumbuh membaur dengan gandum (warga kerajaan Allah) di ladang. Hal ini berarti bahwa baik di dalam gereja Kristus yang kelihatan maupun di dalam Negara ada warga yang termasuk dalam kerajaan duniawi dan ada warga yang termasuk dalam kerajaan ilahi. Kriteria yang membedakan adalah watak tingkah laku warganya, apakah tingkah laku sosialnya bertumpu pada cinta diri atau bertumpu pada cinta akan Allah. Allah sendirilah yang menjadi saksi utama apakah warga dari kedua jenis masyarakat itu hidup dalam cinta diri atau hidup dalam cinta kepada Allah dan sesama. Suara hati terdalam dari manusia memiliki kemampuan untuk membedakan tingkah lakunya yang dikuasai oleh cinta diri atau oleh cinta akan Allah dan sesama. Tidaklah heran bahwa Agustinus menulis: *“Banyak orang yang rupanya berada di luar gereja sebenarnya termasuk anggota gereja, walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Dan banyak yang rupanya termasuk anggota gereja, sebenarnya berada di luar gereja.”*¹⁰ Gereja Kristus yang kelihatan mencerminkan tubuh mistik Kristus di dunia, gereja yang bersifat terbuka. Masyarakat kristen memang dengan sendirinya masuk

10 Ibid, hlm. 151-152.

dalam anggota tubuh mistik Kristus ini, tetapi para warganya tidak selamanya warga dari kota Allah; ada juga warga yang berasal dari kota dunia, yaitu para pendosa/orang berdosa. Sementara itu, masyarakat yang bukan-kristen yang menampak dalam bentuk Negara untuk warganya yang datang dari berbagai lapisan masyarakat dan golongan bisa saja termasuk para warga dari kota Allah, dan itu berarti bahwa warga semacam ini masuk dalam tubuh mistik Kristus, masuk sebagai anggota dari gereja Kristus yang sejati.

3. Filsafat Pancasila dan Neo-Thomisme

Berbicara tentang dua dokumen gereja “*Evangelii Gaudium*” dan “*Misericordiae Vultus*” dalam konteks gereja katolik Indonesia dengan peneropongan filsafat sosial, tidaklah terhindarkan untuk berbicara tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia di satu pihak, dan di lain pihak tentang Neo-Thomisme sebagai perkembangan lanjut pemikiran Agustinus dalam rangka kritik terhadap konsep modern tentang masyarakat. Pemikir dunia modern pada umumnya berpendapat bahwa Agustinus dan Thomas Aquinas dalam traktat mereka tentang masyarakat menganut aliran Teokratis yang melatarbelakangi lahirnya kekuasaan monarki. Pemimpin dilihat sebagai wakil Allah di dunia. Allah sendirilah yang memerintah rakyat melalui raja atau kaiser.¹¹ Tetapi ketika dicermati latar belakang sosial-historis lahirnya pemikiran Agustinus dan Thomas Aquinas, konsep keduanya mendapatkan kesesuaian atau kesepadanan dengan filsafat Pancasila yang tidak melekat pada sistem pemerintahan yang teokratis. Agustinus dan Thomas Aquinas tidak menganut sistem pemerintahan yang teokratis, meskipun konsep mereka memuat benih-benih pembentukan satu masyarakat atau negara teokratis.

Secara ideologis dan konseptual, Pancasila yang menjadi dasar NKRI sedang menjadi milik bangsa Indonesia di dalam kebhinekaan bangsa dan menjadi pedoman untuk hidup bermasyarakat dan bernegara, meskipun pengamalannya di dalam kehidupan masih terus diusahakan. Kekhasan

11 Soehino, S.H., *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005, hlm. 152-153.

Pancasila ketika dikenakan pada tata cara hidup bermasyarakat dan bernegara di Indonesia terletak dalam gagasan etisnya, baik gagasan etis untuk etika individual maupun untuk etika sosial bangsa Indonesia. Di mana letak gagasan etis Pancasila? Kelima sila dalam Pancasila dipandang sebagai satu bangunan ideal yang hidup-hidup dan dinamis dari tingkah laku manusia Indonesia baik tingkah laku individual maupun tingkah laku sosial. Negara Pancasila berarti satu kesatuan bangsa dari keanekaragamannya dengan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang dibangun di atas jiwa kelima sila itu. Maksudnya, pemerintahan diselenggarakan dan dikelola dengan perilaku ideal manusia Indonesia (manusia Pancasila) yang berketuhanan, yang berperikemanusiaan, yang berjiwa kesatuan dalam NKRI, yang berdemokrasi dan yang berkeadilan.

Sebagai satu gagasan etis bangsa Indonesia untuk hidup bernegara dan bermasyarakat, Pancasila dalam terang filsafat sosial mencerminkan etika bernegara dan bermasyarakat dengan dasar etika religius dan dasar etika humanis yang saling meresap satu sama lain. Tingkah laku warganya baik perorangan maupun bersama-sama diwajibkan untuk bersikap takwa kepada Tuhan dan diwajibkan untuk membangun relasi yang harmonis dengan sesama dalam kehidupan sosial.¹² Perilaku kehidupan religius yang dijiwai oleh kebebasan beragama dan kepercayaan mengilhami perilaku sosial yang berperikemanusiaan dalam ranah humanis sila ketiga, keempat dan kelima, sementara perilaku kehidupan yang humanis seperti tercermin dalam sila kedua, ketiga, keempat dan kelima mencerminkan hidup beriman dan bertakwa. Bila digambarkan dalam bentuk diagram, etika religius dan sekaligus humanis ini ditampilkan dengan dua kerucut yang berbentuk belahketupat: kerucut atas dengan sila pertama (prinsip metafisis) yang mendasari etika humanis, dan kerucut bawah sila kelima (prinsip etis-humanis) yang perwujudannya adalah cerminan etika religius. Tepatlah ditandakan oleh bapa pendiri bangsa, bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekular dalam gaya barat dan bukan juga negara agama dalam arti

12 William Chang, Dr., OFMCap., *The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church's Social Doctrine: An Ethical Comparative Study*. Quezon City: Claretian Publications, 199?, hlm.14-15.

negara teokratis. Negara Indonesia adalah negara Pancasila yang didirikan di atas etika humanis-religius. Itulah idealnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Neo-Thomisme yang muncul pada abad 19 dan awal abad 20 sebelum teretusnya Pancasila menemukan gemanya dalam filsafat Pancasila. Neo-Thomisme adalah refleksi filosofis-teologis para pemikir Katolik di abad modern untuk menghidupkan kembali filsafat Thomas Aquinas (1225-1274) dan menjadikan filsafat ini sebagai senjata kritik terhadap filsafat modern yang menyangkal dan menolak prinsip-prinsip metafisis, termasuk menyangkal dan menolak kepercayaan akan Tuhan. Tokoh-tokoh terkenal dari aliran ini di kalangan para pemikir katolik adalah Joseph Pieper, Karl Rahner, Emerich Coreth, Jacques Maritain, Bernard Lonergan dan lain-lain.¹³ Karakter “Neo” pada filsafat Thomas terletak dalam gagasan dasar filsafat Thomas yang dipakai oleh para pemikir katolik sebagai mata pisau untuk membedah borok-borok kelemahan filsafat modern.

Gagasan dasar Thomas Aquinas tentang masyarakat berasal dari pemahannya tentang manusia. Manusia adalah kesatuan substansial yang berdiri sendiri dan terdiri dari jiwa (bentuk/forma) dan badan (materi). Jiwa menjelmakan kemampuannya dalam badan dan hanya bisa dipahami melalui badan manusia, dan badan dimampukan oleh jiwa. Kesatuan macam ini disebut “pribadi”(person). Kemampuan tertinggi jiwa untuk mengatur dan mengontrol kecenderungan badan dan perbuatan manusia adalah akal budi manusia yang berakar dalam akal budi ilahi.¹⁴ Masyarakat dan negara terjadi dengan sendirinya karena manusia itu sendiri dari kodratnya adalah makhluk sosial yang membangun hubungan sosial antara satu dengan yang lain dalam satu bentuk hidup bersama. Bentuk hidup bersama yang paling sederhana dan bersifat kodrati adalah keluarga. Untuk mengatur bentuk hidup bersama yang disebut masyarakat, sudahlah tersedia hukum yang menurut Thomas Aquinas dibedakan atas hukum ilahi, hukum kodrat, dan hukum moral.

13 Robert Audi (Ed.), *The Cambridge Dictionary...*Op.cit., hlm. 527.

14 Harun Hadiwijono, Dr., *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980, hlm. 110-111.

Hukum ilahi (*lex divina*) didefinisikan Thomas sebagai “*akal budi untuk memerintah segala sesuatu, yang ada di dalam Allah sebagai Penguasa alam semesta*”.¹⁵ Segala sesuatu yang adalah ciptaan Allah berada di bawah hukum ilahi. Hukum-hukum lain seperti hukum alam dan hukum moral berasal dari hukum ilahi. Ini berarti bahwa tindakan manusia baik tindakan perorangan maupun tindakan sosial didasarkan dan diukur menurut hukum ilahi, dalam hal ini “akal budi ilahi”. Hukum kodrat adalah peraturan dasar yang menyatu sedari awal dalam hidup manusia, dan manusia menuntun hidupnya dan menentukan perbuatannya menurut hukum ini. Dengan hukum kodrat, manusia secara khas mengambil bagian dalam hukum ilahi. Untuk tindakan-tindakan konkrit, baik untuk tindakan perorangan maupun untuk tindakan sosial, akal budi manusia dalam fungsi praktisnya bertugas menentukan dan mengaturnya. Mencapai kebaikan (hidup yang bahagia/berhasil) adalah sasaran tindakan manusia, sementara untuk pengetahuan, akal budi manusia dalam fungsi teoretisnya bertugas mengetahui kebenaran. Mencapai kebenaran adalah sasaran pengetahuan.¹⁶ Karena itu, hukum kodrat menurut Thomas adalah satu pegangan praktis untuk tindakan manusia. Hukum moral termasuk dalam hukum kodrat yang ada di dalam diri manusia untuk mengatur dan menentukan baik-buruknya tindakan manusia. Hukum moral ini berada di bawah tanggung jawab kehendak bebas dan akal budi manusia dalam relasinya dengan hukum ilahi atau tanggung jawab manusia di bawah tuntunan hukum ilahi. Masyarakat menurut Thomas ada untuk mencapai “kebaikan bersama” (*bonum commune*). Bahasa modern menyebutnya “kesejahteraan umum”. Hukum moral mendasari tindakan negara dalam usaha negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Undang-undang dan peraturan negara diciptakan atas dasar hukum moral, dan dengan adanya prinsip dasar ini, maka semua rumusan undang-undang dan hukum yang dicetuskan subyek melalui kemampuan akal budi praktisnya bersifat terbatas dan tidak bisa mengakomodir semua

15 “*Plan (ratio) der Regierung aller Dinge, der in Gott als dem Herscher des Weltalls besteht*”. Wieland G., *Ethik als praktische Wissenschaft*. Dalam: *Philosophische Propaedeutik. Band 2: Ethik*. Honnefelder/Krieger (Ed.). Paderborn: Ferdinand Schoeningh, 1996, hlm. 62.

16 Honnefelder L., *Person und Menschenwürde*. Ibid., hlm. 223-224.

nilai moral. Meskipun terbatas sifatnya, kebijakan dan tindakan negara tidak boleh diukur dan dinilai semata-mata menurut rumusan dan bunyi undang-undang dan peraturan, karena hukum moral jauh lebih luas dari pada rumusan dan bunyi undang-undang dan peraturan pemerintah. Di dalam hukum moral bersinarlah hukum ilahi yang ditangkap langsung melalui suara hati dan budi manusia. Hukum moral yang dikenal dan ditangkap langsung bersifat universal, seperti: “Lakukanlah yang baik dan jauhkanlah yang jahat”; ”jangan membunuh”; “jangan menambah derita orang”.¹⁷ Hanyalah dibutuhkan kemampuan budi praktis untuk mengaplikasikannya di dalam hukum positif.

Neo-Thomisme berdiri kuat di atas gagasan dasar pemikiran Thomas Aquinas tersebut tentang manusia, masyarakat, etika dan tentang hukum, dan dengan dasar pemikiran itu, para penganutnya melancarkan serangan terhadap gagasan-gagasan dasar filsafat modern yang menolak adanya hukum ilahi dan prinsip-prinsip metafisis. Salah satu tokoh Neo-Thomisme disebut Jacques Maritain (1882-1973). Gagasan dasar filsafat modern yang dikritik Maritain adalah pandangan filsafat modern tentang manusia.¹⁸ Manusia dalam pandangan umum filsafat modern hanyalah semata-mata “*ens naturale*”, eksistensi kodrati yang mengambil sosok dalam ruang dan waktu sejak kelahirannya hingga kematiannya. Filsafat modern sejak pencerahan hingga sekarang menggeluti dan meneliti manusia dalam arti itu dan dibataskan dalam pemahaman tersebut. Prinsip-prinsip metafisis yang melampaui ruang dan waktu, termasuk unsur ilahi yang menyatu dalam eksistensi kodrati manusia, ditolak atau tidak termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Dengan pemahaman dasar itu, teologi sebagai satu ilmu pengetahuan dikategorikan sebagai “bukan ilmu pengetahuan” atau satu pengetahuan yang semu. Masyarakat dipahami sebagai realitas material-historis melulu, dan dimensi sosial tindakan negara tidak perlu diwujudkan atas dasar norma religius. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat sekular yang mengabaikan etika religius yang tidak boleh menjiwai norma moral

17 Wieland G., *Ethik als praktische Wissenschaft*. Ibid, hlm. 62-66.

18 Jacques Maritain, *The Education of Man. The Educational Philosophy of Jacques Maritain*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1987, hlm. 39-43.

masyarakat. Dalam kaca mata modern tersebut, dua dokumen paus yang disoroti dalam artikel ini tentu tidak relevan dan tidak bermakna untuk masyarakat sekular.

Maritain menolak gagasan dasar pemikiran modern itu, dan bila berbicara tentang etika, Maritain berpendapat bahwa norma-norma etis dalam kehidupan masyarakat dan negara memang berakar dalam kodrat manusia.¹⁹ Kodrat manusia itu menurut Maritain sudah melekat dan dikenal langsung di dalam pengalaman manusia sebelum ada refleksi filosofis-teologis tentangnya. Filsafat Moral mempunyai tugas untuk merefleksikannya, tetapi prinsip metafisis, dalam hal ini nilai-nilai religius sebagai elemen hakiki yang menyatu dalam diri manusia –bukan melulu sebagai “*ens naturale*” tetapi “*ens naturale*” yang mengarah kepada dimensi “supranatural” – harus menjadi bagian utama untuk refleksi filsafat moral. Teologi, khususnya Teologi Moral, merupakan satu keharusan dalam pendekatan filsafat moral untuk menyoroti etika kodrati. Hukum dan peraturan negara harus disusun dengan inspirasi teologis.

Di bidang politik, Maritain menekankan “humanisme integral” (kemanusiaan yang integral). Artinya, norma-norma etis yang dianuti dan diadopsikan oleh masyarakat sekular bukanlah dibangun di atas konsep tentang manusia secara integral. Konsep masyarakat sekular tentang manusia hanyalah “sebagian atau parsial”. Dimensi apa yang dilupakan oleh masyarakat sekular? Dimensi religius yang menyatu dalam manusia dilupakan. Menurut Maritain, kemanusiaan yang integral diwujudkan dalam penciptaan norma-norma etis yang bersifat humanis-religius. Masyarakat dan negara harus dibentuk dengan mengadopsi dimensi spiritual. Kebijakan publik, dalam hal ini politik pemerintah, harus diilhami oleh nilai-nilai religius yang menyatu pada masyarakat. Filsafat Pancasila memang sejalan dengan pemikiran Neo-Thomisme.

19 www.en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maritain; Diakses 27 September 2015, Pk. 18.30.

4. Dimensi Sosial “*Evangelii Gaudium*” Dan “*Misericordiae Vultus*” Serta Realitas Sosial-Historis Gereja Katolik Indonesia Dewasa Ini

Sebagaimana sudah disebut sebelumnya, kedua dokumen ini, *Evangelii Gaudium* (Sukacita Injil) dan *Misericordiae Vultus* (Wajah belas kasih), boleh dipandang sebagai satu seruan etis Paus Fransiskus untuk seluruh umat beriman, agar bertingkah laku dengan karakter “sukacita dan berbelaskasih” dalam menghayati hidup imannya di tengah-tengah dunia dewasa ini. Dalam terang Filsafat Sosial, seruan etis ini lebih dipandang dari sudut etika sosial dari pada etika individual. Dimensi sosial dari kedua dokumen itu coba dicermati di bawah ini.

Dalam dokumen “*Evangelii Gaudium*” disebutkan secara eksplisit dimensi sosial dalam proses evangelisasi di dunia modern, yaitu dimensi sosial dalam misi menghadirkan kerajaan Allah di dunia (Bab Empat, No. 176 sampai dengan No. 258). Kerajaan Allah di dunia adalah kerajaan kasih, yang dalam tradisi iman Kristiani dituntun dan dipimpin oleh kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Realitas masyarakat modern dengan masalah-masalah sosialnya begitu kompleks dan rumit, demikian pernyataan Paus Fransiskus. Tetapi dua soal besar dalam pemikiran Paus Fransiskus perlu dihadapi dan disikapi umat beriman, yaitu pelibatan kaum miskin (No. 186-216) dan perdamaian dan dialog sosial (No. 217-258).

Pelibatan kaum miskin berarti tindakan umat beriman untuk melibatkan kaum miskin dalam proses evangelisasi. Siapa itu kaum miskin? Nomor 186 menyebut kaum miskin dan kaum tersingkir sebagai “*para anggota masyarakat yang paling terabaikan*”. Dalam penjelasan lebih lanjut, ketika gereja diajak paus untuk mendengar jeritan kaum miskin dan menaruh peduli terhadap kaum lemah, dua kelompok ini bisa dipahami sebagai mereka yang miskin ekonomis untuk hidup secara layak, mereka yang hina, terpinggirkan dan kurang berbakat oleh karena perdagangan manusia (*human traffick*), mereka yang digugurkan sebelum lahir, dan di dalam rumusan nomor 215 mereka yang lemah dan tak berdaya mengacu pada makhluk ciptaan lain dalam kaitan dengan eksploitasi lingkungan hidup. Seruan etis Paus untuk menyikapi kelompok ini ditemukan dalam pernyataannya yang

menekankan „komitmen keberpihakan dan kepedulian” konkrit umat beriman terhadap kelompok itu, tetapi komitmen keberpihakan dan kepedulian bertumpu lebih pada „*kategori teologis daripada kategori budaya, sosiologis, politis atau filosofis*”.²⁰ Pernyataan ini dalam ranah pemahaman filosofis tentu seiring dengan atau menghidupkan kembali pemikiran para pemikir Katolik dalam tradisi iman Katolik seperti Agustinus, Thomas Aquinas dan Jacques Maritain (penganut Neo-Thomisme). Komitmen keberpihakan dan kepedulian yang dijalankan bersama-sama dalam gereja sebagai satu realitas sosial (etika sosial) dilakukan atas dasar nilai-nilai injili dan nilai-nilai teologis (keyakinan religius). Komitmen keberpihakan dan kepedulian merupakan keharusan dan tuntutan moral untuk menyembuhkan mereka dari penyakit sosial-ekonomis, terutama penyakit kemiskinan yang disebabkan oleh stuktur sosial-ekonomis yang menindas (Nomor 202). Komitmen keberpihakan dan kepedulian yang diresapi oleh semangat injil sangat menyata dalam sikap dan tingkah laku seperti mendengar jeritan orang miskin, bertindak spontan sebagai ungkapan solider, murah hati, berbelaskasih, melakukan keadilan, menjalankan pelayanan rohani, melakukan tindakan praktis untuk menentang kebijakan dan keputusan atau program yang tidak berpihak kepada kaum miskin, menentang aborsi dan sebagainya.

Ketika berbicara tentang kesejahteraan umum dan perdamaian dalam masyarakat, Paus Fransiskus menyoroti buah perdamaian. Perdamaian sejati bukan dipahami sebagai ketiadaan kekerasan, kompromi antara pihak-pihak yang berkonflik, ketiadaan perang, tapi perwujudan keadilan yang lebih sempurna di dalam tata dunia yang dikehendaki Allah. Paus Fransiskus menyebut empat prinsip yang selalu berhubungan dengan konflik sosial. *Pertama*, waktu lebih besar dari ruang. Waktu dipahami sebagai kepenuhan yang adalah ungkapan cakrawala atau horizon yang membentang di hadapan kita. Inilah yang memberi kemampuan kepada umat beriman untuk sabar bertahan di dalam waktu-waktu yang sulit dan pahit. Pernyataan teologis Agustinus menampak dalam pemahaman ini, bahwa Tuhan membiarkan

20 *Evangelii Gaudium* - Sukacita Injil....*Op.cit.*, hlm. 114.

rumpun ilalang dan gandum bertumbuh membaur. Karena itu, dibutuhkan saja keterbukaan terhadap proses-proses yang sedang terjadi dalam ziarah hidup yang panjang. *Kedua*, kesatuan menang atas pertentangan. Konflik dan pertentangan itu adalah fakta sosial. Tetapi diperlukan kemauan untuk menghadapi dan menyelesaikannya dengan mengacu pada Yesus Kristus. *Ketiga*, kenyataan lebih penting dari gagasan. Kenyataan adalah segala fakta sebagaimana adanya sebelum direfleksikan, sementara gagasan adalah hasil refleksi atau cetusan pikiran yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Untuk berpihak pada kenyataan, dibutuhkan penghindaran bentuk-bentuk yang memanipulasi dan menyembunyikan kenyataan. *Keempat*, keseluruhan lebih besar dari pada bagian. Diperlukan sikap “bertindak lokal dalam perspektif global”. Model yang dianjurkan Paus adalah “polyhedron”, yaitu model yang memantulkan konvergensi dari semua bagian, yang masing-masing bagiannya tetap mempertahankan kekhasannya.

Ketika berbicara tentang dialog sosial sebagai sumbangan untuk perdamaian, Paus Fransiskus mengedepankan beberapa jenis dialog untuk mewujudkan perdamaian. Dialog antara iman, akal budi dan ilmu pengetahuan, dialog ekumenis antara gereja katolik dengan gereja-gereja kristen lainnya, dialog antara gereja katolik dengan bangsa Yahudi, dialog antaragama, dialog sosial dalam konteks kebebasan beragama, semua jenis dialog ini dipromosikan Paus Fransiskus dalam rangka membangun perdamaian sejati di antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam dokumen “*Misericordiae Vultus*”, tema „Belas Kasih Allah” yang ditemukan dalam Kitab Suci, terutama dalam tindakan Yesus, sudah dari sendirinya berdimensi sosial, yaitu berbelaskasih terhadap yang lain dalam ziarah hidup ini. Meskipun seluruh dokumen ini berdimensi sosial dalam terang nilai-nilai religius-kristiani, tetapi nomor 15 sampai dengan nomor 20 dari Bula Paus Fransiskus ini secara tajam menyebutkan tindakan-tindakan belaskasih yang ditujukan kepada orang-orang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang tak berdaya dan tak bersuara di tengah-tengah kaum kaya dan penguasa, orang-orang yang menderita dan terluka, orang berdosa yang bertobat. Secara khusus dalam nomor 19, seruan etis Paus Fransiskus secara langsung ditujukan kepada organisasi mafia dan para koruptor. Kepada organisasi kriminal mafia, Paus Fransiskus berkata:

*"Robahlah hidupmu!"*²¹, dan ketergantungan mutlak hidup para anggota mafia pada uang haruslah diputuskan. Kepada para koruptor, Paus Fransiskus mencap perbuatan korupsi sebagai dosa besar dan luka berat dalam masyarakat, karena melalui keserakahan dan kekejaman para koruptor, masa depan orang miskin dan lemah dihancurkan. Untuk umat beriman, seruan etis untuk bertindak dengan sikap belas kasih harus berakar di dalam nilai-nilai religius, khususnya nilai-nilai injili, dan dengan dasar ini, umat beriman dipanggil untuk membuka hatinya untuk kelompok-kelompok sosial tersebut di atas, turut aktif membalut luka dan menyembuhkan penyakit sosial mereka, membaharui hidup rohaninya melalui penerimaan sakramen pengampunan dari bapa pengakuan, dan secara khusus dikirimkan para misionaris yang berperan sebagai ibu yang berbelaskasih terhadap umat Allah melalui kotbah dan penerimaan sakramen belas kasih Allah (Sakramen Pengakuan) kepada umat beriman. Pada Nomor 20, sikap belas kasih menurut Paus Fransiskus tidak cukup. Sikap ini harus dibarengi dengan keadilan. Sikap belas kasih dan keadilan adalah dua dimensi dari realitas yang sama, yaitu realitas kasih. Realitas kasih merupakan kepenuhan dari perwujudan sikap belas kasih dan keadilan.

Isi kedua dokumen yang diungkapkan di atas dihadapkan dengan realitas sosial-historis gereja katolik Indonesia dewasa ini. Dalam terang ilmu sosial, realitas sosial gereja katolik Indonesia adalah satu komponen sosial katolik atau masyarakat katolik yang bersama-sama dengan komponen sosial lain dengan label agama dan kepercayaannya membentuk satu kesatuan sosial yang lebih besar dengan sebutan "bangsa Indonesia" atau masyarakat dan negara Indonesia. Dalam perbandingan dengan keseluruhan penduduk Indonesia, umat katolik yang berada di dalam 36 keuskupan (Tahun 2004) dengan paroki-paroki di dalam setiap keuskupan hanya mencapai 3,05% dari total penduduk Indonesia 237.641.326 (sekitar 238 juta) di tahun 2010. Tahun 2000, penduduk Indonesia berjumlah 206.264.595 (sekitar 206 juta), dan tahun 2015 sebanyak 255.461.685 (sekitar 256 juta) orang. Jumlah penduduk miskin menurut keterangan Badan Statistik Nasional tahun 2013

21 *"Aendert euer Leben!"*. Misericordiae Vultus. Verkuendigungsbulle...Op.cit., hlm. 26.

sebanyak 28.55 juta dengan rincian: penduduk desa yang miskin 17.92 juta dan penduduk kota yang miskin 10.63 juta. Kini jumlah orang miskin sudah mencapai sekitar 35 juta.

Masyarakat katolik Indonesia dalam statistik gereja katolik pada tahun 2004 terkonsentrasi dalam 6 keuskupan, yang mayoritas penduduknya beragama katolik.²²

Keuskupan	Penduduk	Umat Katolik	Persentase Katolik
Ende	712.491	693.885	97.39%
Ruteng	637.193	615.330	96.57%
Atambua	493.044	475.775	96.50%
Larantuka	274.373	256.280	93.41%
Agats	77.850	45.750	58,77%
Sanggau	530.043	265.492	50.09%

Sebagai catatan kecil, jumlah umat katolik di keuskupan Malang sebesar 88.255 orang dari total penduduk keuskupan Malang 14.829.884 (sekitar 15 juta) pada tahun 2004; itu berarti hanya 0,60% dari penduduk keuskupan Malang.

Gambaran umum tentang kekuatan ekonomi yang dimiliki umat katolik sungguh memprihatinkan. Kemiskinan material meliliti lebih dari dua pertiga jumlah umat katolik, khususnya di wilayah-wilayah keuskupan yang mayoritas penduduknya katolik. Dari pengalaman-pengalaman konkrit di lapangan, kolekte hari Minggu di stasi-stasi di desa seperti yang dialami di keuskupan Larantuka tidak sampai 100 ribu rupiah, di pusat paroki antara 100 ribu sampai dengan 500 ribu rupiah. Di Katedral Larantuka, yang umatnya adalah para pegawai negeri dan Cina Katolik, kolekte hari minggu berkisar 6 juta Rupiah. Para Romo yang bekerja di paroki-paroki memperoleh honor yang kecil untuk kesejahteraan hidupnya, yaitu sekitar 300 ribu per bulan,

22 www.ekaristi.org/statistik; diakses pada tanggal 29 September 2015 Pk. 15.00.

sementara biaya pendidikan mereka untuk menjadi imam ditangani seratus persen oleh orang tua mereka yang dewasa ini pada umumnya orang tua pegawai negeri sipil. Tidak heran bahwa kesulitan ekonomi paroki memungkinkan mereka untuk menciptakan kebijakan, peraturan dan tuntutan iuran paroki yang membebankan umat. Hidup ekonomis umat Katolik yang bukan pegawai negeri sipil katolik di wilayah-wilayah itu sangat lemah dan boleh dikatakan berada di tingkat kemiskinan hingga tingkat di bawah garis kemiskinan. Jumlah upah minimum perbulan di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2000 adalah Rp. 184.000, dan pada tahun 2008 sudah naik menjadi Rp. 650.000 (Keputusan Pemerintah Kabupaten Flores Timur 5 Nopember 2008), sementara pendapatan per kapita untuk para petani dan nelayan sebagai pelaku ekonomi utama tidak sampai rata-rata di bawah satu juta rupiah. Ada tanaman perdagangan seperti kopi, cengkeh, kakao, jambu mente, tapi harga di pasar rendah, sehingga untuk kehidupan pokok saja tidaklah mungkin diandalkan dari hasil perdagangan ini. Dampaknya bisa terbaca, bahwa hidup layak hanya berada di tangan para pegawai negeri sipil yang mendapat gaji tetap dari pemerintah, sementara umat katolik yang bukan pegawai negeri sipil lebih suka pergi merantau ke luar daerah oleh karena beban hidup yang berat. Ketika mereka berada di tanah rantau, mereka membangun komunitas katolik sebagai komunitas katolik yang pada umumnya miskin. Di Paroki Santo Arnoldus Bekasi, umat katolik berjumlah sekitar 27 ribu, dan dari jumlah itu umat katolik yang berasal dari NTT pada umumnya miskin menurut informasi Pastor Parokinya; ada juga umat katolik yang termasuk kelas menengah, tapi jumlah mereka bisa dihitung dengan jari.

Terlepas dari hidup imannya, umat katolik di Indonesia hingga masa reformasi ini adalah bagian integral dari suka-duka hidup bangsa Indonesia. Ketika Konferensi Uskup-Uskup Katolik Indonesia mengeluarkan Nota Pastoral pada tahun 2004 tentang penyakit sosial bangsa Indonesia yang merusakkan keadaban publik di segala bidang kehidupan bangsa, umat katolik mengidap juga penyakit-penyakit sosial itu.²³ Salah satu penyakit sosial yang sedang menggerogoti hidup bersama sebagai satu bangsa adalah korupsi

23 Nota Pastoral KWI, *Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa*. Dalam: *Spektrum: Dokumentasi dan Informasi KWI*, No. 1 Tahun XXXIII, 2005, hlm. 163-177.

yang beruratakar dalam satu gaya hidup cari untung. Gaya hidup ini menurut bula Paus Fransiskus tersebut di atas menghancurkan masa depan orang miskin. Hidup dalam satu sistem ekonomi kapitalis global seperti yang berlaku pada penyelenggaraan ekonomi di Indonesia saat ini (ekonomi pasar bebas), berarti melakukan kegiatan ekonomi gaya cari untung, dan dengan demikian, para penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat desa, termasuk umat katolik yang terlibat dalam penyelenggaraan negara di tiga bidang pemerintahan (bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif), tidak luput dari jebakan gaya hidup cari untung. Bukanlah rahasia lagi, bahwa korupsi seperti dilansir dalam media sosial menggerogoti oknum-oknum di bidang eksekutif (bupati, gubernur, kepala desa) yang dipelentir dengan sebutan “**eksekuthieves**” (maling-maling di bidang eksekutif), di bidang legislatif (anggota DPR) yang dipelentir “**legislathieves**” (maling-maling di bidang legislatif) dan di bidang yudikatif (hakim dan advokat) yang dipelentir “**yudikathieves**” (maling-maling di bidang yudikatif). Gaya hidup cari untung ini ditopang oleh budaya kolusi, korupsi dan nepotisme yang dihayati manusia Indonesia, termasuk orang katolik hingga era reformasi ini. Malah kaum klerus pun dalam hirarki gereja menghayati gaya hidup cari untung itu, seperti terdengar bahwa bendahara paroki yang adalah romo memboyong dan membawa lari uang kolekte umat.

Selain fenomena sosial di atas, ada lagi fenomena sosial lain yang menggambarkan realitas sosial gereja katolik di Indonesia dewasa ini. Fenomena sosial itu adalah relasi antara kaum awam katolik dan para klerus. Di keuskupan yang mayoritas penduduknya adalah umat katolik terbaca juga bahwa ulah dan gaya hidup para klerus menjadi batu sandungan untuk hidup iman umat katolik. Beberapa peristiwa konkrit yang melibatkan para klerus sebagai pejabat gereja berdampak pada terpecahbelahnya umat katolik. Peristiwa yang melibatkan diri uskup misalnya dengan sendirinya menciptakan kubu sosial yang pro uskup (awam katolik dan sebagian para klerus) dan kubu sosial yang melawan uskup (awam katolik dan sebagian para klerus). Isu-isu yang beredar pun menyuburkan kondisi keterpecahan sosial dalam gereja Katolik, ketika kejujuran, keadilan dan kebenaran terbenam dalam politik rekayasa. Bukanlah hal yang mustahil, bahwa di Flores sudah ada tendensi “anti-klerikal”.

5. Wajah Gereja Katolik yang bersukacita dan berbelaskasih di Indonesia?

Di belakang judul ini diberi tanda tanya. Tentu dalam perspektif filsafat sosial, khususnya etika sosial, tanda tanya tersebut mengindikasikan, bahwa jawaban “ya” dan “tidak” bersifat tidak tegas, tapi antara “ya” dan “tidak”. Seruan etis Paus Fransiskus dalam kedua dokumen itu adalah satu tawaran untuk peri laku gereja katolik di Indonesia **“secara bersama-sama”** dalam konteks etika sosial, agar wajah tingkah laku sosial gereja mencerminkan sukacita injili dan menunjukkan wajah yang berbelaskasih terhadap yang lain, teristimewa terhadap orang miskin dan lemah. Para pemikir katolik seperti Agustinus, Thomas Aquinas, penganut Neo-Thomisme, bahkan filsafat Pancasila sudah menggumuli isi seruan Paus Fransiskus itu, ketika mereka melontarkan gagasan mereka tentang etika humanis-religius.

Di dalam perjalanan sejarah umat katolik, baik dalam sejarah umat katolik sedunia maupun dalam sejarah umat katolik Indonesia sejak dulu hingga sekarang, nilai-nilai injili yang menjiwai tindakan sosial dengan karakter “sukacita” dan “belas kasih” baik aksi individual maupun aksi bersama dalam organisasi keuskupan, paroki, stasi dan komunitas basis sudah dan sedang dihayati. Tindakan bersama-sama untuk berbelas kasih terhadap yang miskin dengan peri laku yang dijiwai oleh sukacita injili menyata dalam aksi-aksi sosial lewat komisi sosial-ekonomi keuskupan dan paroki untuk membantu keluarga miskin, untuk mendanai peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan untuk menanggulangi korban bencana alam. Tidakkah tersangkal, bahwa karya karitatif gereja katolik di Indonesia baik karya karitatif individual maupun karya karitatif yang diemban oleh kaum religius dan awam katolik dalam satu organisasi sungguh dialami dan dinikmati oleh umat katolik Indonesia, bahkan oleh umat yang bukan-katolik di mana saja di Indonesia.

Akan tetapi dengan jawaban “tidak”, pernyataan “ya” bisa dibatalkan, bahwa gereja katolik di Indonesia menampilkan wajah “sukacita” dan “berbelaskasih”. Gereja katolik di Indonesia “tidak” menampilkan wajah itu. Argumentasinya bertolak dari realitas sosial-historis gereja katolik di Indonesia dewasa ini. Wajah “sukacita” dan “berbelaskasih” bukanlah wajah yang tampil dominan dengan karakter itu dalam pengamatan sosial-historis.

Paus Fransiskus mengulang perkataan Paus Paulus VI: *“Dalam menghadapi situasi yang begitu luas dan bermacam ragam..... Terserah kepada komunitas Kristianilah untuk menganalisa secara obyektif situasi yang khas bagi negara mereka sendiri.”* (Evangelii Gaudium, No. 184). Dengan perkataan ini, beranilah ditandaskan bahwa situasi sosial-historis umat katolik di Indonesia, memperlihatkan kekhasan wajah gereja katolik Indonesia, dan dari analisa terhadap realitas sosial-historis yang ditampilkan di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa wajah dominan gereja katolik Indonesia dewasa ini adalah wajah gereja *„yang menderita”* dan wajah gereja *“yang tak berdaya”*. Kedua karakter ini, wajah yang menderita dan tak berdaya (powerless), berhubungan erat satu sama lain.

Wajah gereja katolik yang menderita di Indonesia mengacu pada kenyataan kehidupan ekonomis umat katolik di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya adalah orang katolik. Kebanyakan umat katolik di Indonesia menderita kemiskinan material. Kemiskinan material ini bukan disebabkan oleh mentalitas malas bekerja, tetapi oleh struktur ekonomi yang “memiskinkan” mereka. Penyakit sosial yang diderita bangsa Indonesia seperti korupsi mengambil wajah seorang penolong yang baik hati, tetapi di dalam kenyataannya wajah pemeras dan penindas. Dana bantuan dari pusat misalnya, seperti pada masa Orde Baru ada dana untuk desa tertinggal di Flores (proyek desa tertinggal), berkarakter “membantu” penduduk setempat yang miskin, tetapi dalam pelaksanaan proyeknya, dana tersebut tertelan di tengah jalan. Kebanyakan dana dalam pertanggungjawaban formal dan yuridis dikebiri untuk urusan administrasi dan birokrasi dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Dalam masa reformasi kini, korupsi secara sangat sistematis mendapat cela dan peluang, dan menurut para pengamat politik, korupsi menyelinap masuk melalui kebijakan-kebijakan formal, seperti kemungkinan korupsi di dalam kebijakan program bantuan desa untuk seluruh desa di Indonesia. Masalah kemiskinan dan pemiskinan massa ada secara terang-terang di dalam kehidupan umat katolik, tetapi persoalannya yang masih menjadi tugas semua warga dan pemerintah, juga tugas gereja katolik di Indonesia adalah, bagaimana orang Indonesia mengentaskan kemiskinannya.

Pertanyaan terakhir ini memunculkan satu sisi lain dari kehadiran gereja katolik di Indonesia dewasa ini. Sisi lain dari wajah gereja katolik adalah wajah gereja „yang tidak berdaya” (powerless). Dari sisi kuantitas umat katolik dalam perbandingan dengan jumlah penduduk Indonesia, kekuatannya tak berarti: 3,05 % Katolik dan 96.95% bukan-katolik. Dialog sosial seperti yang diserukan oleh Paus Fransiskus untuk gereja Katolik Indonesia dijalankan secara jelas di tiga komponen kekuatan sosial: antara gereja katolik dengan penganut agama lain (dialog antaragama); antara gereja katolik dengan pemerintah dan jajarannya; antara pemegang hirarki dan awam katolik di dalam tubuh gereja katolik sendiri. Salah satu langkah yang patut diapresiasi ialah seruan etis kenabian gereja katolik melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam Nota Pastoral tentang penyakit sosial bangsa Indonesia di segala bidang kehidupannya (korupsi, kekerasan dan kerusakan lingkungan) dan pembentukan habitus baru bangsa, tetapi ketika seruan etis ini menjelma menjadi “komitmen” bersama gereja katolik untuk mengobati penyakit-penyakit sosial tersebut, gereja katolik tersandung dalam “ketidakmampuannya” untuk menghadapi kekuatan dan kebijakan dari luar gereja katolik, bahkan orang-orang katolik sendiri dicengkeram oleh penyakit-penyakit sosial itu. Politik gereja katolik di seluruh dunia, bahwa para klerus tidak boleh terlibat dalam politik praktis, memperparah ketidakmampuan itu, karena implementasi kebijakan-kebijakan publik yang merugikan rakyat banyak hanya berhenti pada gaung profetis gereja melawannya, tetapi aksi untuk melawannya dipandang sebagai bukan ranahnya. Dengan cara seperti ini, para klerus tidak direpotkan oleh persoalan-persoalan sosial konkrit masyarakat dan tetap hidup terbuai dalam kemapanannya.

Penutup

Pada bagian penutup tidaklah dibuat satu kesimpulan, tapi sekedar satu rangkuman dari kelima bagian artikel ini. Tugas filsafat sosial dijelaskan dalam rangka untuk memberi arah pemahaman terhadap filsafat sosial Agustinus, Filsafat Pancasila dan Neo-Thomisme. Dalam bagian kedua dimunculkan filsafat sosial Agustinus, yang memberi sumbangan pemikiran yang sehat tentang jati diri gereja katolik di dalam konteks realitas sosial-

historis pada masanya, dan pemikirannya itu dalam tradisi gereja katolik dikembangkan oleh Thomas Aquinas dan penganut Neo-Thomisme yang sejalan dengan filsafat Pancasila dalam butir tentang etika religius-humanis seperti diuraikan dalam bagian ketiga. Bagian keempat dan kelima memuat satu usaha penulis untuk membaca realitas sosial-historis gereja Katolik di Indonesia dewasa ini dalam hubungan dengan dimensi sosial kedua dokumen gereja tersebut, dan cara pemahaman itu bermuara kepada penilaian terhadap wajah gereja Katolik Indonesia atas dasar realitas sosial-historis kehadirannya dewasa ini.

KEPUSTAKAAN

- Audi, Robert (Ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. New York: Cambridge University Press, 1995
- Chang, William Dr., OFMCap., *The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church's Social Doctrine: An Ethical Comparative Study*. Manila: Claretian Publications, 1997
- Hadiwijono, Harun Dr., *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980
- Haeffner, Gerd, *Philosophische Anthropologie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1989
- Heinzmann, Richard, *Philosophie des Mittelalters. Grundkurs Philosophie 7*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1992
- Honnefelder L., *Person und Menschenwuerde*. Dalam: *Philosophische Propaedeutik Band 2: Ethik*. Honnefelder/Krieger (Ed.). Paderborn: Ferdinand Schoeningh, 1996
- Kerber, Walter, *Sozialethik. Grundkurs Philosophie 13*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1998
- New Catholic Encyclopedia. Second Edition. Washington: The Catholic University of America, 2003
- Nota Pastoral KWI: *Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru*. Dalam: *Spektrum: Dokumentasi dan Informasi KWI*, No. 1 Tahun XXXIII, 2005, hlm.163-177

- Seri Dokumen Gerejawi No. 94, *Evangelii Gaudium Sukacita Injil*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, Juli 2014
- Sermada, Donatus, “Etika Sosial Nilai dan Institusi dalam Peneropongan Psikoanalisa”, dalam Andreas Ata Ujan dkk. (eds.). *Moralitas Lentera Peradaban Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011
- Soehino, S. H., *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005
- Van Diepen P, Mgr., OSA., *Augustinus Tahanan Tuhan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000
- Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 200, *Misericordiae Vultus Verkuendigungsbulle von Papst Franziskus zum Ausserordentlichen Jubilaem der Barmherzigkeit*. Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 2015
- Wieland G., *Ethik als praktische Wissenschaft*. Dalam: *Philosophische Propaedeutik Band 2: Ethik*. Honnefelder/Krieger (ed.). Paderborn: Ferdinand Schoeningh, 1996
- www.ekaristi.org/statistik; diakses 29 September 2015, Pk. 15.00
- www.en.wikipedia.org/Jacques_Maritain; diakses 27 September, Pk. 18.30.

